LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) BPR MADANI SEJAHTERA ABADI TAHUN 2023

Jalan C.Simanjuntak no.26 Terban Gondokusuman Yogyakarta
TELEPON: (0274) 549400

BAB I
PENJELASAN UMUM

BPR Madani Sejahtera Abadi secara berkelanjutan berupaya menyempurnakan penerapan praktik GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi. Bank menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah komponen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPR Madani Sejahtera Abadi telah beroperasi selama 18 tahun dan secara konsisten melakukan perbaikan dalam menerapkan prinsip- prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip- prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transperancy), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kesetaraan (Fairness). Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk menjadi penyedia layanan perbankan sesuai perkembangan jaman dan membantu memenuhi kebutuhan nasabah di Yogyakarta.

Dalam penerapan GCG, Bank selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi instisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh Pemangku Kepentingan Bank (Stakeholders).

Selama tahun 2023, Bank selalu berupaya untuk mewujudkan hal- hal tersebut melalui salah satunya dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang secara konsisten dan berkelanjutan (sustainability).

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Y. Triagung Pujiantoro
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan. 2. Terkoordinasinya semua aktivitas BPR baik di bidang operasional, pendanaan, perkreditan, pemasaran dan sumber daya manusia. 3. Terjaminnya pelaksanaan pemasaran dan perkreditan BPR dengan baik, tertib, dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku 4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar BPR. 5. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Undang-undang 6. Memastikan penerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 7. Menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan factor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat. 8. Mempresentasikan RBB yang telah disusun dihadapan Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan setelah disetujui Dewan Komisaris diteruskan kepada OJK. 9. Mengkomunikasikan Rencana Bisnis BPR yang telah disusun kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi pada BPR. 10. Melaksanakan seluruh Rencana Bisnis BPR yang telah disusun. 11. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 12. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham 13. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai. 14. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 15. Memastikan laporan keuangan dapat terlaksana secara tepat waktu dan valid.		
2.	Nama	:	Lisa Sulistyaning Kencanasari
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan, Manajemen Resiko, dan		

APU PPT.
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PE Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko.
3. Pencapaian anggaran sesuai target kerja di bidang Operasional, Funding,SDM, dan Administrasi Kredit.
4. Terjaminnya pelaksanaan aktivitas operasional BPR dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
6. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
7. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
9. Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/ atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan APU dan PPT
11. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
12. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,dan/atau otoritas lainnya.
13. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
14. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
15. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. RBB 2022 sebagai acuan bisnis di tahun 2022 dan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja.
2. Rutin melakukan Stress Test untuk evaluasi atas restrukturisasi KYD Covid 19 dan potensi resiko NPL.
3. Assessment dilakukan terhadap debitur yang direstrukturisasi dan terdapat tunggakan lebih dari 3x angsuran.
4. Mengoptimalkan penyelesaian agunan yang diambil alih (AYDA) an. Haryanto
5. Terus mengupayakan peningkatan pencapaian tabungan
6. Percepatan proses migrasi CBS dan telah dilakukan komunikasi dengan vendor untuk membuat time schedule proses migrasi.
7. Menindaklanjuti temuan PE AI dan PE Kepatuhan-MR
8. Menerapkan GCG dalam setiap kegiatan dan pengelolaan operasional sehari-hari.
9. Menunjuk "Personal In Charge" (PIC / Petugas) yang khusus mengatur keseimbangan kebutuhan dana dan penyaluran dana (penempatan dana dan kebutuhan penyaluran kredit serta menjaga likuiditas), mengatur keseimbangan Asset & Liabilities sehingga diperoleh pendapatan yang optimal

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Yanuar Pudya Madindra
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. 5. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. 6. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam 3 bulan. 7. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 8. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan rencana kerja apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan. 9. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan meminta tanggung jawab direksi serta meminta langkah- langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari ketentuan yang berlaku.		
2.	Nama	:	Hary Purwowidodo
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. 5. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. 6. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam 3 bulan. 7. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 8. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan rencana kerja apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan. 9. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan meminta tanggung jawab direksi serta meminta langkah- langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari ketentuan yang berlaku.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
1. Jadikan RBB 2023 sebagai acuan operasional di tahun 2023 dan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja 2. Pemenuhan PPAP kredit lancar menjadi 0,5% pada tangal 1 April 2023 3. Memperhatikan KDK OJK Nomor 34/ KDK.03/2022, untuk melakukan assessment sejak			

awal tahun 2023 kepada semua debitur restrukturisasi karena dampak Covid 19 yang masuk kategori kredit non umkm dan hasilnya dijadikan dasar pengambilan keputusan atas peyelesaian restrukturisasi. 4. Tetap dilakukan strest test secara Triwulanan, sehingga dapat terdeteksi resiko- resiko terburuk yang bisa terjadi dan pemberian rekomendasi penanganannya 5. Memperhatikan deviasi nilai NIM teoritis (10,93%) dengan nilai NIM realisasi (5,80%) direkomendasikan untuk melakukan program penagihan tunggakan bunga secara lebih intensif 6. Memperhatikan kondisi kualitas Kredit Yang Diberikan (KYD) di tahun 2023 dan TRW IV 2023, direkomedasikan untuk dibuat RENCANA TINDAK (ACTION PLAN) kepada Debitur Bermasalah (K/ L / DM) dan Lakukan MONITORING secara intensif (Periodik) atas pelaksanaan dari Rencana Tindak tersebut. 7. Selain melakukan Penyelesaian Debitur Bermasalah (K/ L/ DM) sebagaimana diatas, direkomendasikan juga untuk membuat REN CANA TINDAK (ACTION PLAN) untuk Debitur Menunggak (DPK) dan KYD Restrukturisasi Covid19. Bila perlu dibuat TASK FORCE penanganan kredit menunggak (FT2/FT3) dan Kredit Rest. COVID19. 8. Pastikan penyelesaian AYDA bisa selesai sesuai rencana 9. Penerapan Tata Kelola di setiap lini organisasi 10. Terkait dengan pencapaian KYD harus tetap memperhatikan prinsip kehati- hatian; penyelesaian debitur besar bermasalah maupun potensi bermasalah 11. Perhatikan dan lakukan perbaikan terkait temuan PE AI dan PE Kepatuhan- MR yang belum dipenuhi/diperbaiki 12. Pemenuhan dan perbaikan terkait temuan hasil pemeriksaan OJK tahun 2023 13. Lakukan pengkinian data nasabah bulanan sesuai rencana yang telah disusun 14. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap nasabah PEP dan nasabah berisiko tinggi
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR belum wajib memiliki komite- komite sehingga belum membentuk/ memiliki komite komite sebagai mana dimaksud	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	:	BPR belum wajib memiliki komite-komite sehingga belum membentuk/ memiliki komite komite sebagai mana dimaksud

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR belum wajib memiliki komite-komite sehingga belum membentuk/ memiliki komite komite sebagai mana dimaksud			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Y. Triagung Pujiantoro	Rp0	0%
2.	Lisa Sulistyaning Kencanasari	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			

1. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR 2. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan baik vertikal maupun horisontal dengan pemegang saham

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Y. Triagung Pujiantoro	-	-	0%
2.	Lisa Sulistyaning Kencanasari	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR lain maupun perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Y. Triagung Pujiantoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Lisa Sulistyaning Kencanasari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Y. Triagung Pujiantoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Lisa Sulistyaning Kencanasari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga baik vertikal maupun horisontal dengan sesama Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yanuar Pudya Madindra	Rp0	0%
2.	Hary Purwowidodo	Rp1.950.000.000	10%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Salah satu Dewan Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham sebesar 10%			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Hary Purwowidodo	600867	PT. BPR Putera Dana	3.27%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu Dekom mempunyai kepemilikan saham sebesar 3,27% di BPR lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yanuar Pudya Madindra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Hary Purwowidodo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yanuar Pudya Madindra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Hary Purwowidodo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan Keluarga dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp748.800.000	2	Rp439.200.000
2.	Tunjangan	2	Rp1.690.039.100	2	Rp193.962.007
3.	Tantiem	2	Rp480.275.230	2	Rp202.746.527
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp727.849.100	2	Rp116.562.007
Total			Rp3.646.963.430		Rp952.470.541
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil operasional (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan pajak (2)	Tunjangan pajak (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS Direksi adalah mobil dinas, pajak penghasilan dan BPJS			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.8 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.7 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	19 Januari 2023	2	Pencapaian kinerja tahun 2022
2.	10 April 2023	2	Pencapaian kinerja bulan Maret 2023
3.	03 Mei 2023	2	1. Evaluasi Operasional terkait rencana otomasi transaksi sehubungan dengan telah selesainya

			Renovasi Lobby di bulan Juni 2023 2. Perkembangan dan Kondisi Perkreditan sampai dengan April 2023 sehubungan belum tercapainya RBB 2023 Januari s/d April 2023
4.	03 Mei 2023	17	Penyampaian kinerja triwulan I 2023 oleh Direksi dan pejabat struktural kepada Dewan Komisaris
5.	10 Juli 2023	2	1. Penurunan Kualitas Kredit 2. Pendapatan Bunga Kredit belum sesuai dengan RBB 2023
6.	25 Juli 2023	15	Penyampaian kinerja triwulan II 2023 oleh Direksi dan pejabat struktural kepada Dewan Komisaris
7.	18 Agustus 2023	2	Updating situasi kegiatan bisnis/Perkreditan, yaitu Rencana Penyelesaian Debitur Bennasalah (K/L/ DM) dan Pengelolaan Nasabah Menunggak (terutarna FT3)
8.	05 Oktober 2023	2	Pencapaian kinerja bulan September 2023
9.	10 Oktober 2023	17	Penyampaian kinerja triwulan III 2023 oleh Direksi dan pejabat struktural kepada Dewan Komisaris
10.	02 November 2023	2	Updating situasi kegiatan bisnis/Perkreditan, yaitu Rencana Penyelesaian Debitur Bennasalah (K/L/ DM) dan Pengelolaan Nasabah Menunggak (terutarna FT3)
11.	08 Desember 2023	8	Pemaparan dari Direksi dan TIM penyusun RBB tahun 2024
12.	11 Desember 2023	2	Persetujuan Rencana Bisnis Bank tahun 2023
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan Komisaris secara umum telah memenuhi ketentuan minimal rapat yang wajib dihadiri secara tatap muka			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Yanuar Pudya Madindra	12	0	100%
2.	Hary Purwowidodo	12	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris selalu hadir secara fisik saat pelaksanaan rapat				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	2	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	2	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		1		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat Fraud selama tahun 2023. Upaya penyelesaian Fraud tahun sebelumnya dari 2 kasus, 1 kasus diselesaikan melalui jalur hukum								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nasabah dipailitkan oleh pihak lain dan salah satu obyek menjadi budle pailit. Agunan dalam posisi telah terikat HT sebelum keputusan pailit		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							

2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	17 Juni 2023	Sosial	CRS anak panti asuhan	Panti Asuhan Khodijah Sinar Melati 23	Rp3.000.000
2.	03 Oktober 2023	Sosial	Pemberian beasiswa kepada anak-anak terpilih sesuai kriteria	Penerima bea siswa	Rp20.000.000
3.	06 Oktober 2023	Sosial	Pemberian bantuan kambing bersama LazizNU	LazizNU	Rp26.250.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana hanya untuk Sosial untuk menggerakkan UMKM, beasiswa dan keagamaan, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik					

BAB III
HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	BPR MADANI SEJAHTERA ABADI
Alamat	:	Jalan C.Simanjuntak no.26 Terban Gondokusuman Yogyakarta
Nomor Telepon	:	(0274) 549400
Posisi Laporan	:	Desember 2023
Modal Inti	:	Rp27.896.870.792
Total Aset	:	Rp505.972.480.781

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPR MADANI SEJAHTERA ABADI Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)

b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.80	0.360
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.67	0.251
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.23	0.223
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.98	0.198
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.80	0.045
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.12	0.212
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.15	0.161
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.70	0.203
Nilai Komposit			**2**
Predikat Komposit			**Baik**

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.8)

Telah berjalan baik

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.67)

Telah berjalan baik

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Telah berjalan baik

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Telah berjalan baik

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.23)

Telah berjalan baik

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.98)

Telah berjalan baik

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.8)

Telah berjalan baik

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.12)

Telah berjalan cukup baik perlu peningkatan

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.15)

Telah berjalan baik

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Telah berjalan baik

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.7)

Telah berjalan cukup baik perlu peningkatan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan
bahwa:
Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPR MADANI SEJAHTERA ABADI periode Desember
2023 telah berjalan dengan baik. Nilai komposit GCG sebesar 2

Yogyakarta, 26 Januari 2024

BPR MADANI SEJAHTERA ABADI

Menyetujui

Y. Triagung Pujiantoro
Direktur Utama

Yanuar Pudya Madindra
Komisaris Utama